

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Donald Trump adalah Presiden AS ke-45 yang merupakan lulusan dari sekolah *New York Military Academy*, *Fordham University*, dan *Wharton School of Finance*. Presiden kelahiran New York pada 14 Juni 1946 ini memenangkan pemilu pada November 2016 mengalahkan Hillary Clinton (New York Times, 2016). Donald Trump sebelumnya dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di bidang *real estate* dan mantan bintang *reality show* stasiun televisi. Grand Hyatt New York yang dibuka pada tahun 1980 membuat Trump menjadi pemilik pengembang kota paling terkenal. Ia melisensi namanya di berbagai hotel, *resort*, lapangan golf, properti perumahan di kawasan kota hingga kasino. Kemudian usahanya juga merambah ke usaha ritel, makanan, *cologne*, *furniture* hingga Universitas Trump (Biography, 2021).

Pada tahun 2015, Trump mengalihkan perhatiannya ke politik dengan mengikuti konvensi sebagai calon Presiden AS di partai Republik. Trump memenangkan konvensi tersebut dan mengumumkan pencalonannya sebagai kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Republik pada 19 Juli 2016 (Wirawan M. K., 2020). Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dari kampanye hingga terpilihnya Trump sebagai Presiden AS mengalahkan Hillary Clinton pada November 2016 dengan 304 suara *Electoral Vote*, banyak kebijakan-kebijakan Trump yang menjadi sorotan. Karena sebelumnya Trump identik dengan latar belakang sebagai pebisnis, kemudian ia harus menyesuaikan diri menjadi seorang politisi dan sebagai Presiden AS. Dari banyaknya kebijakan-kebijakan Presiden AS terdahulu, Trump merupakan presiden yang

dianggap kontroversial. Dengan karakter berupa *aggressive leader*, sikap justifikasi Trump mengedepankan kepentingan nasional dengan alasan keamanan nasional dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan (Fadil, 2020).

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Trump dianggap berorientasi lebih sempit (Yom, 2020). Dikatakan berorientasi lebih sempit di sini karena, kebijakan tersebut cenderung diambil berfokus ke dalam negeri dengan kata lain AS berupaya mengurangi komitmen di tingkat internasional dan fokus pada kepentingan nasional. Dibuktikan dengan kampanye atau pidato Trump dan pada *National Security Strategy AS* pada 2017 (Dugis, 2019). Hal tersebut harusnya tidaklah sesuai dengan negara seperti Amerika Serikat yang memiliki sumber daya yang kuat, pengaruh yang besar di dunia internasional serta adanya citra hegemoni. Dengan orientasi yang sempit atau cenderung kepada *American First* atau proteksionisme, akan membuat pengaruh yang dimiliki negara seperti AS berkurang. Meskipun beberapa ahli mengatakan definisi sempit ini merupakan langkah AS untuk memitigasi dan mengelola penurunan hegemoninya (Walt, 2016). Namun, hal ini jauh berbeda dengan kebijakan Presiden AS terdahulu seperti George Bush misalnya, yang berorientasi pada pembebasan AS dan dunia dari terorisme. Atau Barack Obama yang mengorientasikan kepentingan luar negeri AS untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dengan adanya pemerataan kesejahteraan dan ekonomi (Dugis, 2019).

Kebijakan awal yang dikeluarkan Trump setelah terpilih sebagai Presiden AS yaitu pada 25 Januari 2017. Dimana ia menandatangani perintah eksekutif pembangunan tembok di perbatasan Meksiko yang

menjadi pembatas antara Amerika Serikat dan Meksiko. Meskipun pada kampanyenya kebijakan ini akan didanai oleh Meksiko namun pada akhirnya Amerikalah yang mendanai pembangunan tembok tersebut dan hanya selesai 445 mil (716 km) dari 722 mil keseluruhan panjang perbatasan (BBC News, 2020). Kemudian pada 27 Januari 2017, Trump mengeluarkan perintah eksekutif pelarangan masuk dari beberapa negara muslim yaitu Irak, Iran, Libya, Sudan, Yaman, Somalia, dan Suriah yang disahkan oleh Mahkamah Agung pada 2018 meski banyak terjadi penolakan (Iswara, 2021).

Pada 1 Juni 2017, Trump menarik Amerika dari *Paris Agreement* yang merupakan perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 untuk mengawal reduksi karbon dioksida yang berlaku pada tahun 2020. Memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem pada Mei 2018. Kemudian pada 8 Mei 2018, Trump menetapkan kembali sanksi terhadap Iran dan menarik diri dari perjanjian nuklir internasional dengan Iran. Padahal pada pemerintahan Barack Obama, AS telah mencoba membangun diplomasi yang cukup baik dengan Iran dan dunia Islam hingga tercapainya kesepakatan nuklir tersebut (Debora, 2020). Tak hanya itu di regional Asia, Trump juga mengambil langkah politik yang memicu terjadinya perang dagang dengan China melalui penetapan 25% bea masuk barang impor senilai 50 miliar dollar AS (Iswara, 2021).

Kebijakan lain yang juga menjadi sorotan pada kepemimpinan Donald Trump yaitu manuver politiknya di Timur Tengah. Trump atas nama AS melakukan pengakuan terhadap Yerusalem yang menyebabkan timbulnya berbagai kecaman terutama dari negara-negara Arab. Pada 5 Desember 2017, negara-negara Arab yang tergabung dalam

Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo terkait pernyataan AS atas Yerusalem (Akim, 2018). Perlu kita ketahui bahwa Liga Arab adalah organisasi regional yang masih memiliki keberpihakan terhadap Palestina sejak dibentuk secara resmi pada tahun 1945. Bahkan kemerdekaan Palestina menjadi misi dari pembentukan Liga Arab yang beranggotakan negara-negara Arab dan sebagian Afrika seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko yang melakukan normalisasi dengan Israel baru-baru ini (Wibowo, 2014).

Hasil dari pertemuan darurat tersebut menegaskan bahwa keputusan AS tersebut ilegal karena merusak proses perdamaian, memperdalam ketegangan dan menimbulkan kemarahan. Mereka meminta AS untuk membatalkan keputusannya dan bekerja dengan komunitas internasional untuk mewajibkan Israel mengakhiri pendudukannya di Palestina melalui solusi damai yang menjamin pendirian negaranya dengan Yerusalem sebagai ibukotanya. Mereka juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa keputusan AS itu bertentangan dengan resolusi internasional (Egypt Today staff, 2017).

Selain mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, Trump juga mendukung pemukiman Israel di Tepi Barat wilayah yang dicari Palestina untuk dijadikan wilayah kedaulatan negaranya. Investasi Israel di permukiman Tepi Barat berdasarkan data resmi Israel yang diberikan kepada Departemen Luar Negeri AS antara 2017 hingga 2019 meningkat hampir setengahnya dibandingkan tiga tahun terakhir di kepemimpinan Obama. Sehari sebelum pelantikan Biden pada Januari 2021, Israel mengeluarkan tender untuk lebih dari 2.500 rumah permukiman di Tepi

Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, di atas ratusan lainnya yang diumumkan oleh Netanyahu. Hubungan AS dengan Palestina mencapai titik terendah baru, setelah Trump memotong \$ 360 juta dana tahunan untuk *The United Nation Relief and Work Agency* (UNRWA) badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani pengungsi Palestina, kemudian AS juga mengurangi bantuan lainnya untuk Palestina, dan menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington DC (Ayyub, 2021).

Kemudian pada 2020, dunia dikejutkan dengan adanya normalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab yang didukung oleh AS. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah mengkonfirmasi hal tersebut, Trump mengizinkan Israel untuk menuai hasil dari hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab ini sebagai imbalan untuk mengesampingkan rencana ekstremis Netanyahu untuk mencaplok bagian dari Tepi Barat yang diduduki (Margalit, 2021). Padahal anggota Liga Arab pada konflik Palestina dan Israel dalam inisiatif bersama, negara anggota menolak normalisasi hubungan dengan Israel sampai kemerdekaan Palestina terwujud dan mematuhi keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab untuk memberikan jaring pengaman finansial sebesar 100 juta dolar AS untuk Palestina (Hardoko, 2012). Adanya normalisasi ini berarti bahwa tekad negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab ini yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko sudah dikatakan memudar. Meski adanya bantahan bahwa mereka tidak mengkhianati Palestina, akan tetapi tetap saja hal ini akan semakin menyudutkan usaha Palestina untuk mendirikan negara sendiri.

Sementara Trump mengklaim bahwa normalisasi hubungan yang ditengahi oleh AS ini sebagai kesepakatan politik terbaik di dunia, Iran

yang hubungannya mulai renggang kembali dengan AS setelah penarikan diri Trump dari kesepakatan nuklir mengeluarkan kutukukan dan menentang atas keputusan normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel ini. Iran menganggap adanya normalisasi ini sebagai bentuk pengkhianatan negara Arab terhadap Palestina, menjual Islam sebagai kesepakatan kepentingan nasional semata (W, 2020). Mendorong terjadinya normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel merupakan kesekian alasan yang mengukuhkan bahwa Trump benar-benar mendorong AS berada di pihak Israel. Hubungan Israel dengan negara-negara Arab memang jauh dari kata harmonis setelah terjadinya berbagai konflik terdahulu. Kebijakan Trump terhadap Iran juga telah merusak kesepakatan yang telah dibangun AS dan Iran pada masa kepemimpinan Obama.

Lebih dari itu, yang perlu kita ketahui bahwa dibalik dukungan Trump yang begitu berani memberikan manuver politik kuat untuk mendukung Israel tanpa sengaja ia telah memperburuk citra tentang AS dimata dunia. Uni Eropa merespons hal tersebut sebagai suatu kebijakan yang dapat menenggelamkan stabilisasi politik di kawasan Timur Tengah. Meski kecewa dengan kebijakan Trump, Uni Eropa tetap bertekad untuk mendukung solusi dua negara dalam konflik Palestina dengan Israel ini (EU, 2020). Kepemimpinan sebelum Trump sebenarnya memang memiliki hubungan yang erat dengan Israel akan tetapi AS tidak perlu sejauh ini mengorbankan banyak hal. Di masa kepemimpinan Trump menjadi puncak dimana AS benar-benar secara tidak langsung melalui kebijakan Trump mendeklarasikan diri berada di pihak Israel, AS bahkan menjadi tuan rumah penandatanganan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab, Bahrain dengan Israel (Sekarwati, 2020).

Di balik setiap keputusan yang dikeluarkan Donald Trump sebagai Presiden AS perlu diwaspadai tidak hanya kepentingan nasional atas nama negara saja yang ingin dicapai, namun disinyalir terdapat nilai politik yang lebih penting untuk menaikkan eksistensi individu Trump sebagai calon presiden pada Pemilu AS di akhir tahun 2020. Keputusan normalisasi yang diusung Trump ini mengundang kemarahan Iran yang memiliki hubungan kurang baik dengan AS semenjak Trump menarik diri dari kesepakatan Nuklir Iran pada 2018, adanya hubungan baik antara Israel dengan negara-negara Arab ini mungkin akan menjadi peluang baru bagi AS sebagai sekutu kawasan Timur Tengah untuk menekan Iran. Maka dari itu, tulisan ini akan mencoba menganalisa kepentingan politik atas kuatnya dorongan Donald Trump terhadap normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka terbentuklah rumusan masalah yaitu, **Mengapa Presiden Donald Trump Mendorong Terjadinya Normalisasi Hubungan antara Negara-Negara Arab dengan Israel?**

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka itu bertujuan untuk melihat novelti (kebaruan peneliteiten), ada beberapa tulisan yang menjadi bahan untuk mengarahkan opini pada tulisan ini, salah satunya Jurnal yang ditulis Denise M. Bostdorff yang berjudul *Obama, Trump, and Reflections on The Rhetoric of Political Change* dijelaskan pemikiran untuk membandingkan dua orang sosok Presiden AS yang dilihat dari segi citra sangat berbeda dengan kontinuitas dan diskontinuitas retorika perubahan politik. Para sarjana dan pakar sudah membedah warisan kebijakan

Obama dengan beberapa perdebatan untuk konsekuensi perubahan domestik, Obama dalam masa jabatan pertamanya antara lain, Undang-Undang Pemulihan dan Reinvestasi Amerika, Undang-Undang Perawatan Terjangkau, dan reformasi *Wall Street*. Kemudian perjanjian kebijakan luar negeri yang signifikan dalam masa jabatan keduanya seperti pemulihan hubungan dengan Kuba, kesepakatan nuklir Iran, dan Kesesuaian iklim Paris. Sedangkan pada masa Trump, AS telah menarik diri dari perjanjian Paris, sementara banyak pencapaian kebijakan Obama lainnya yang terancam tidak berkelanjutan. Tulisan ini menawarkan tentang bagaimana emosi dan perubahan, reaksi balik dan korban, kebesaran harapan heroik, dan media sosial dan advokasi kontrafaktual, dengan perhatian diberikan kepada Obama dan penggantinya yaitu Trump (Bostdorff, 2017).

Kemudian sebuah jurnal menjadi tinjauan sosok Trump sebagai Presiden AS yang ditulis oleh Brigitte L. Nacos, Robert Y. Shapiro, dan Yaeli Bloch-Elkon yang berjudul *Donald Trump: Aggressive Rhetoric and Political Violence* menaruh skeptisitas terhadap sosok Presiden AS ini. Dalam abstraknya dijelaskan selama pencalonan presiden Donald Trump dan wacana politik kepresidenan di AS menjadi lebih penuh kebencian dan memecah belah. Ancaman dan kekerasan aktual terhadap kelompok dan individu yang dikucilkan dan diejek oleh Trump meningkat. Sasaran serangan verbalnya adalah sebagian besar dari semua ras, etnis, dan agama minoritas, media berita kolektif dan jurnalis individu, dan politisi terkenal, kebanyakan Demokrat. Dengan asumsi bahwa retorika agresif oleh para pemimpin politik berpengaruh memengaruhi kata-kata dan tindakan pendukung mereka, kami memeriksa ujaran kebencian *online* dan *offline* Trump, reaksi retorika para pengikutnya, dan konsekuensi kekerasan yang diderita oleh musuh

yang mereka nyatakan. Pada kesimpulan dari tulisan ini mengatakan Trump menjadi Presiden AS pertama yang dalam pernyataan publik menyatakan simpati dan dukungan untuk ekstremis kanan yang kejam dan dengan demikian menarik mereka ke dalam politik arus utama (Brigitte L. Nacos, 2020).

Untuk melihat karakter Trump yang populer dengan media sosialnya *The Power of Trump-speak: Populis Crisis Narratives and Ontology Security* oleh Alexandra Homolar dan Ronny Scholz dijadikan salah satu rujukan bacaan dalam tulisan ini. Dikatakan bahwa keberhasilan kampanye Trump dalam pemilihan Presiden AS juga berasal dari penggunaan yang efektif dari narasi krisis anti-kemampuan yang bermuatan emosional. Dengan wawasan dari psikologi politik, penulis memeriksa mekanisme sosio-linguistik yang mendasari efektivitas *'Trump-speak'* melalui analisis konten kuantitatif dan kualitatif dari perangkat komunikasi Trump selama kampanye pemilihan Presiden AS 2016. Klaim legitimasi kepemimpinannya sangat bergantung pada 'pembicaraan krisis' yang menempatkan audiensnya dalam bingkai kerugian kemudian hal tersebut akan berdampak pada perilaku politik. Menurut tulisan ini, kisah-kisah krisis yang diceritakan oleh agen-agen politik secara bersamaan menanamkan ketidakamanan ontologis di antara publik Amerika dan berfungsi untuk mengubah kecemasan mereka menjadi keyakinan bahwa agenda kebijakan narator adalah jalan kembali ke 'normalitas'. Melalui mekanisme retorik ini, kampanye Trump memanipulasi keamanan ontologis (dalam) individu sebagai alat dalam politik jaminan di tingkat masyarakat yang lebih luas (Scholz, 2019).

Untuk menelaah sisi kebijakan AS terhadap Palestina beberapa artikel yang dibaca oleh penulis diantaranya jurnal artikel oleh Ayfer

Erdogan dan Lourdes Habash berjudul *U.S. Policy Toward the Israeli-Palestinian Conflict under the Trump Administration: Continuity or Change?* merupakan salah satu tulisan yang membahas tentang bagaimana sebenarnya pada masa kepemimpinan Trump AS memiliki kebijakan yang berpihak terhadap Israel pada konflik Israel dan Palestina. Dipublikasi dari Insight Turkey pada 2020, tulisan ini menyelidiki pilar utama kebijakan AS terhadap konflik Israel-Palestina dan untuk menganalisis sejauh mana terjadinya pergeseran kebijakan Pemerintahan Trump terhadap konflik ini dari pendahulunya. Kesimpulan pada tulisan ini menunjukkan sikap skeptis tentang pemerintahan AS di masa Trump sebetulnya tidak jauh berbeda dari pendahulunya, bantuan yang mengalir ke Israel tidak pernah berhenti sedangkan keberadaan orang Palestina hanya diakui secara retorik oleh AS, terbukti dari penolakan Amerika untuk mengakui Organisasi Pembebasan Palestina setelah didirikan. Pemerintah AS juga menutup mata terhadap penolakan sistematis hak-hak dasar Palestina oleh Israel dan telah berjuang untuk melegitimasi tindakan Israel sebagai perang melawan terorisme. Tiga tahun terakhir di bawah jabatan Trump beberapa tindakan kejam yang dihadapi oleh institusi Palestina dan legitimasi tindakan Israel yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional (Habash, 2020).

Kemudian, *U.S Foreign Policy in The Middle East: The Logic of Hegemonic Retreat* sebuah tulisan dari jurnal *Global Policy* oleh Sean Yom memaparkan tentang menurunnya minat hegemoni AS di Timur Tengah, kebijakan luar negeri pemerintahan Trump sering dianggap sebagai ideologi isolasionis yang secara radikal telah membalikkan kepemimpinan global Amerika dalam hitungan tahun. Di Timur Tengah, para kritikus memuji Doktrin Trump sebagai penyerahan hegemoni AS

yang bahkan lebih keras yang telah menentukan tatanan regional sejak 1980-an. Pada kenyataannya, minat Amerika di kawasan ini telah menurun selama satu dekade seperti yang diungkapkan oleh keengganannya yang meningkat untuk memanfaatkan supremasi ekonomi dan militernya untuk membatasi, mengatur, dan menghancurkan yang dianggap musuh seperti dulu. Saat ini musuh AS satu-satunya hanyalah Islamisme Iran, dan tidak ada penting dari hal tersebut kecuali jika ada tindakan terorisme yang dasyat dari Iran (Yom, 2020).

Lalu, sebuah jurnal yang dipublikasi oleh *Journal of Palestine Studies* pada 2018 yang berjudul *And Now What? The Trump Administration and the Question of Jerusalem* oleh Rashid I. Khalidi berpendapat bahwa keputusan AS di bawah Trump untuk mengakui Yerusalem merupakan bagian dari sejarah panjang bias yang menguntungkan Israel, dan tentunya pengabaian kepura-puraan AS sebelumnya tentang ketidakberpihakan. Tulisan ini mengatakan keputusan atas Yerusalem adalah bagian dari pendekatan yang disebut “*outside-in*” terhadap konflik, di mana negara-negara klien AS di wilayah tersebut secara bertahap menormalkan hubungan dengan Israel dan menerima posisi standar Israel, sambil menekan Palestina untuk membuat konsesi lebih lanjut ke Israel (Khalidi R. I., 2018).

Dalam melihat hubungan antara Trump dengan kaum Yahudi Israel beberapa artikel digunakan penulis sebagai bahan bacaan antara lain, *The U.S. – Israel “special relations”: Structural foundations and Trump factor* yang ditulis oleh A.A Davydov dan L.M Samarskaia pada 2020 membahas evolusi hubungan khusus AS-Israel untuk memperkirakan skala dan umur panjang efek kebijakan Trump terhadap Israel. Pada awal kampanye pemilihan presiden 2016, keadaan hubungan

bilateral sering dianggap rusak akibat keputusan pemerintahan Obama untuk melakukan negosiasi dengan Iran dan abstain untuk memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334. Bertentangan dengan itu, Donald Trump konsisten dalam posisinya yang benar-benar antikritis dan pro-Israel, mewujudkan semua janji awalnya mengenai negara Yahudi. Pada akhir masa jabatan pertamanya, dia secara signifikan mengubah kerangka kerja kebijakan tradisional Amerika yang sudah mapan ke Israel. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dinamika seperti itu dapat menjadi pola dalam hubungan AS-Israel, dan bagaimana prospek hubungan ini yang secara serius ditentukan oleh polarisasi internal AS. Para penulis menyimpulkan bahwa karena asimetri struktural hubungan AS-Israel, dinamika mereka sebagian besar akan ditentukan oleh perubahan dalam strategi besar dan polarisasi Amerika Serikat. Namun demikian, kerumitan dan sejumlah besar kelompok berpengaruh yang tertarik untuk mempertahankan tingkat kerja sama yang luar biasa akan mencegah perusakan fondasi struktural hubungan khusus AS-Israel di masa mendatang (Samarskaia, 2020).

Artikel singkat berjudul *Trump, Israel, and The American Jewish Community* yang ditulis oleh Ari Heston pada 2017, mengakuisisi kemenangan Trump dalam pemilu AS ditahun tersebut sebagai sebuah dilemma perspektif antara dua kaum Yahudi dengan beda negara ini. Bagaimana para Yahudi Israel khususnya politisi sayap kanan Israel sibuk merayakan kemenangan elektoral Donald Trump sementara kaum Yahudi Amerika Serikat menyatakan keprihatinan yang mendalam atas hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran orang-orang Yahudi Amerika tentang meningkatnya xenofobia dan ujaran kebencian yang menyertai kebangkitan politik Trump. Sedangkan kemenangan Trump menarik dimata Yahudi Israel karena saat kampanye terdapat ancaman

Trump yang akan menenggelamkan kapal perang Iran, menekankan perlunya mengambil sikap keras terhadap teror Islam radikal, dan menyatakan bahwa permukiman Tepi Barat bukanlah hambatan untuk perdamaian (Hestein, 2017).

Kemudian untuk melihat jalan politik AS di bawah Trump terhadap Iran beberapa tulisan yang menjadi bahan telaah pada tulisan ini antara lain, *The Return to The Pressure Track: The Trump Administration and The Iran Nuclear Deal* oleh Matthew Kroenig. Jurnal ini menganalisa Donald Trump dalam janji kampanyenya untuk "menegosiasikan ulang" Rencana Aksi Komprehensif Bersama Juli 2015, yang lebih dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran. Kesepakatan itu tidak mencegah Iran untuk membangun senjata nuklir dan dalam beberapa hal sebenarnya memudahkan Iran untuk menggunakan nuklir di masa depan. Menurut Trump kelanjutan dari kesepakatan saat ini dapat merusak kepentingan Amerika di Timur Tengah dan kebijakan non-proliferasi globalnya. Analisis tulisan ini memberikan strategi yang dapat diikuti oleh Pemerintahan Trump untuk meningkatkan kebijakan Amerika terhadap Iran, yaitu melakukan apa yang dilakukan Iran terhadap Amerika Serikat: mematuhi persyaratan perjanjian yang ketat, sambil bersaing dalam semua cara yang tidak tercakup dalam kesepakatan. Peningkatan tekanan pada Teheran akan membatasi pengaruh Iran yang tidak stabil di wilayah tersebut. Seiring waktu, Washington dapat memanfaatkan tekanan untuk memaksa Iran kembali ke meja perundingan guna mencapai kesepakatan yang dirundingkan ulang yaitu berhasil dalam tujuan jangka panjang AS untuk mencegah Iran membangun senjata nuklir (Kroenig, 2018).

Trump's "Maximum Pressure" and Anti-Containment in Iran Regional Policy oleh Hamidreza Azizi, Vali Golmohammadi dan Amir

Hossein Vazirian memuat pembahasan tentang gagalnya “Maximum Treasure” Trump setelah 2 tahun penarikan AS dari perjanjian nuklir Iran. Kegagalan membawa Iran kembali dalam perundingan mengekang program nuklir dan misilnya, serta melawan pengaruh proksi Iran di wilayah tersebut. Sebaliknya, Iran telah mengadopsi strategi "*Maximum Resistance*" untuk menghadapi tekanan AS. Tulisan ini berpendapat strategi Iran tersebut didasarkan pada pencegahan asimetris, yang pilar utamanya menggunakan pasukan sekutu lokal dan meningkatkan kemampuan pencegahan udara dan laut. Sementara itu, kekuatan militer-keamanan Iran telah mendapatkan keuntungan dalam berurusan dengan Amerika Serikat, mengesampingkan aparat diplomatik. Situasi ini menanggung risiko konfrontasi antara Iran dan Amerika Serikat sementara tidak adanya ruang untuk keterlibatan secara berarti dari diplomasi (Hamidreza Azizi, 2020).

Pada penulisan tesis ini membahas hal yang cukup berbeda, berfokus pada sebuah objek yaitu Donald Trump, dimana ia membuat keputusan-keputusan yang berani mengambil posisi memberikan keuntungan lebih banyak kepada Israel. Prioritasnya terhadap sebuah negara yaitu Israel membuat AS seolah bukanlah negara yang memiliki keberpihakan kepada kebenaran dan perdamaian dunia sepenuhnya. Melalui analisa kebijakan, latar belakang cerita individu yang bersumber dari tulisan-tulisan diatas mungkin dapat menjadi acuan bagi penulis untuk mendapatkan unsur sebagai penguat argumen pada penelitan ini.

D. Kerangka Pemikiran

1. Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Decision Making Process*)

Kebijakan luar negeri muncul bagi sebagian besar negara untuk memenuhi persyaratan kepentingan nasional secara paralel dengan tidak mengurangi aturan hubungan publik internasional antar negara dan memperoleh peran yang lebih dari yang disediakan oleh struktur internal. Politik luar negeri diartikan sebagai suatu rencana yang menarik hubungan luar negeri dengan negara lain (Youssef, 1985). Juga dikenal sebagai *behavioral state* terhadap lingkungan luar, terhadap negara-negara yang berada di luar lingkungan non-negara internasional seperti organisasi internasional dan gerakan-gerakan pembebasan atau tentang masalah tertentu (Kafarneh, 2013).

Proses pengambilan keputusan politik di luar negara berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain sesuai dengan komposisi sistem politik negara tersebut. Faktor yang menentukan pembuatan kebijakan luar negeri ada 4 yaitu faktor lingkungan keputusan, faktor psikologi, faktor internasional dan faktor domestik (Jr, 2010). Sedangkan komponen dalam pembuatan kebijakan luar negeri antara lain, mengidentifikasi masalah keputusan, mencari alternatif, memilih alternatif, dan mengeksekusi alternatif (Robinson, 1965). Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri mengacu pada pilihan yang dibuat individu, kelompok, dan koalisi yang mempengaruhi tindakan suatu negara di panggung internasional. Keputusan kebijakan luar negeri biasanya ditandai dengan taruhan tinggi, ketidakpastian yang sangat besar, dan risiko substansial.

Kebanyakan dari apa yang kita baca tentang urusan internasional hanya menyangkut tindakan negara dan para pemimpinnya. Pengambilan Keputusan Luar negeri adalah jalan penting penelitian karena cara pengambilan keputusan dapat membentuk pilihan akhirnya. Artinya, seorang aktor dapat mencapai hasil yang berbeda tergantung pada proses pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan kognitif yang signifikan sering kali mengganggu proses informasi. Beberapa keputusan dihitung dengan hati-hati, sedangkan yang lain lebih intuitif. Jalannya politik dunia dibentuk oleh keputusan para pemimpin. Ketidakpastian yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri dapat berkaitan, misalnya, dengan motif, keyakinan, niat, atau perhitungan lawan (Renshon, 2008).

Terdapat tiga faktor individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara menurut Alex Mintz dan Karl DeRouen, faktor pertama merupakan *leader's personality* atau kepribadian pemimpin yang memiliki artian kepribadian sebagai suatu proses integrasi berpola individual dari proses persepsi, memori, penilaian, pencarian tujuan dan ekspresi serta regulasi emosional. Yang kedua yaitu *leadership style*, yang dibagi menjadi 2 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu pemimpin yang didorong oleh tujuan, memfokuskan diri untuk memecahkan suatu masalah atau dengan kata lain pemimpin yang berorientasi pada tugas, cenderung tidak membutuhkan koalisi baik dari internasional maupun domestik sebelum mengambil keputusan dan mempertahankan kebijakan.

Lalu pemimpin yang didorong oleh konteks, jenis ini cenderung mudah beradaptasi dengan situasi saat ini. Para pemimpin tipe ini terbuka untuk saling berdiskusi untuk menemukan solusi yang fleksibel

dalam berbagai masalah. Pemimpin ini dapat menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan situasi tertentu dan bekerja untuk membangun koalisi di tingkat internasional. Dari kedua tipe pemimpin tersebut kemudian dikelompokkan kembali dalam tipologi gaya kepemimpinan menjadi empat kategori yaitu pemimpin *crusader*, pemimpin strategis, pemimpin pragmatis dan pemimpin oportunistik. Faktor ketiga yang mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri dalam level individu adalah *leadership psychology*. Psikologi kepemimpinan mengacu pada berbagai elemen psikologis seperti nilai, bakat dan pengalaman sebelumnya serta asumsi yang dibawa oleh setiap pemimpin ke dalam proses pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri (Jr, 2010).

Politik luar negeri Trump dalam mendorong terjadinya normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel bisa dikatakan keputusan yang diambil Trump secara intuitif. Faktor *Leadership Style* menjadi faktor individu yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Trump dengan gaya *crusader* secara *expansionis* dan *evangelis*. Dimana pemimpin *crusader* yaitu pemimpin yang menantang batasan politik tapi cenderung tertutup terhadap berbagai informasi baru. Tipe pemimpin *crusader* terbagi lagi menjadi dua tipe. Pertama *crusader expansionis* yaitu seorang pemimpin menginginkan lebih banyak wilayah dan kekuasaan berdasarkan tingkat nasionalismenya yang tinggi, kepercayaan diri, dan motivasi kekuasaan, cenderung ingin memiliki kontrol yang besar, memiliki kemampuan yang rendah terhadap berbagai alternatif pembuatan keputusan, dan cenderung untuk tidak mementingkan hubungan pertemanan. Tipe kedua pemimpin *crusader evangelis* yang lebih nyaman dengan hubungan dan

mempengaruhi orang lain menuju tujuan yang sama dengan mereka (Jr, 2010).

Berdasarkan tipe tersebut, Trump menjadikan Israel benar-benar sebagai “teman baik” yang memiliki kepentingan yang sama dan musuh yang sama, hingga melewati batas kewajaran posisi keputusan AS secara politis di mata internasional. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan AS dengan Israel sebelum masa kepemimpinan Trump memang harmonis. Akan tetapi terdapat alasan lain mengapa Trump mengeluarkan kebijakan luar negeri yang cukup berani untuk mendorong normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel bahkan dengan memberikan imbalan dari AS sebagai jaminan atas normalisasi hubungan tersebut.

2. Legitimasi Kekuasaan

Kekuasaan digunakan hampir mencakup semua tindakan politik, studi tentang kekuasaan merupakan subjek ilmiah politik. Steve Lukes mengatakan “*power is the ability to get someone to do what they would not otherwise*” (Lukes, 2005). Kekuasaan memiliki 3 dimensi menurut Lukes yaitu, mampu membuat keputusan, kekuasaan dicerminkan dari pembuatan agenda-agenda kebijakan politik dan mampu mencegah keputusan-keputusan lain, serta kemampuan mengendalikan orang lain terhadap pikiran dengan memanipulasi preferensi dan persepsi mereka (Young, 1978). Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai peluang bahwa seseorang dalam hubungan sosial dapat mencapai keinginannya sendiri bahkan melawan perlawanan orang lain. Ini adalah definisi yang sangat luas dan mencakup berbagai jenis kekuasaan (Lebow, 2017). Miriam Budiardjo mengatakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain

sesuai dengan keinginan para pelaku, hal tersebutlah yang dimaksud kekuasaan (Budiardjo, 2009).

Menurut Habermas, legitimasi berarti bahwa ada argumen yang baik agar klaim tatanan politik diakui sebagai benar dan adil; sebuah tatanan yang sah membutuhkan pengakuan. Legitimasi berarti kelayakan suatu tatanan politik untuk diakui. Definisi ini menyoroti fakta bahwa legitimasi adalah klaim validitas yang dapat digugat; stabilitas tatanan dominasi (juga) tergantung pada (setidaknya) pengakuan de facto-nya (Habermas, 1976). Sumber utama dukungan yang tersebar adalah keyakinan akan legitimasi. Penanaman rasa legitimasi yang mungkin merupakan satu-satunya perangkat yang paling efektif untuk mengatur aliran dukungan yang tersebar untuk kepentingan otoritas dan rezim (Dennis, 1965). Legitimasi atau keabsahan merupakan sifat yang menentukan bagaimana kekuasaan tersebut diwujudkan menjadi otoritas yang baik dan absah, serta memastikan kekuasaan tersebut ditaati karena kharisma bukan karena otoritas yang menakutkan. Sifat legitimasi ini yaitu memberikan dukungan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, karena dengan adanya legitimasi pemerintah mempunyai hak untuk membuat keputusan (Djuyandi, 2017).

Menurut Plato legitimasi kekuasaan adalah dimana negara membutuhkan kekuasaan absolut, guna mendidik warganya dengan nilai-nilai moral yang rasional. Keadaan ideal mengandung ketidakadilan terhadap manusia tidak ada kebebasan sebagai individu manusia, karena Plato mengucilkan semua individu pribadi dari konsep negaranya, untuk menjaga moral standar (Universitas Maarif Hasyim Latif, 2017). Klaim validitas Max Weber atas legitimasi dapat didasarkan dalam 3 pandangan yaitu, dasar rasional bertumpu pada kepercayaan pada 'legalitas' pola aturan normatif dan hak mereka yang

diangkat ke otoritas di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah (otoritas hukum). Yang kedua dasar-dasar tradisional, bertumpu pada kepercayaan yang mapan pada kesucian tradisi kuno dan keabsahan status dari mereka yang menjalankan otoritas di bawahnya (otoritas tradisional). Dan yang ketiga landasan karismatik, bertumpu pada pengabdian pada kesucian khusus dan luar biasa, kepahlawanan atau karakter teladan dari seseorang, dan pola atau tatanan normatif yang diungkapkan (Smith, 1970) (Gaus, 2011).

Negara penganut demokrasi liberal seperti AS, menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan dengan kata lain, penguasa ditentukan oleh rakyat meski pada kenyataannya hal tersebut diwakili elite politik seperti anggota Kongres. Legitimasi kekuasaan dimiliki oleh seorang, kelompok atau pemimpin haruslah memiliki pengaruh yang kuat. Bukan hanya tentang pembuatan kebijakan, namun bagaimana nantinya kebijakan tersebut harus diikuti oleh objek atau sasaran dari kebijakan tersebut. Kebanyakan penguasa menggunakan otoritas untuk mempertahankan kekuasaan dan untuk mewujudkan keinginan mereka pada masyarakat. Penguasa membutuhkan pemerintahan secara sah dengan persetujuan dan dukungan terutama dari beberapa bagian penting yang terikat oleh hukum (Lake, 2013). Kunci untuk membangun legitimasi adalah menyediakan tatanan politik yang membuat masyarakat lebih baik dengan alternatif yang masuk akal.

Tradisionalitas kekuasaan bisa dikatakan kategori sosial yang seharusnya dapat selalu berjalan mengikuti arus dari waktu ke waktu, namun manuver pembuatan kebijakan secara politis dapat mengakibatkan perubahan dari sisi dimensi legitimasi dari kekuasaan ini. Donald Trump sebagai Presiden AS tentunya telah memiliki legitimasi secara legal namun hal tersebut tidaklah cukup. Kebijakan-kebijakan

Trump yang melahirkan kritik internasional akan mengikis legitimasi politiknya sendiri dan berdampak terhadap AS dan lama-kelamaan AS akan kehilangan supremasi politiknya di kancah politik global kontemporer (Ahmad Sahide, 2019).

Dasar rasional dapat digunakan untuk menjabarkan pilihan yang dapat Trump lakukan untuk memperkuat legitimasinya, membangun kembali strategi untuk mendapatkan “kepercayaan” karena dasar sikap Trump yang beretorika agresif pada kebijakan dalam negerinya menurunkan kepercayaan masyarakat AS terhadapnya (Brigitte L. Nacos, 2020). Secara rasional dalam membangun kembali kepercayaan, Trump harus menentukan alternatif yang dirasa normal, sesuai norma dan cenderung menguntungkan bagi kelompok masyarakat tertentu demi mendapatkan pemilih sebanyak-banyaknya. Posisi Trump yang masih memiliki kekuasaan sebagai Presiden AS, dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan keberpihakan dan mendukung Israel, memanfaatkan identitas Yahudi untuk menarik simpatik atau kepercayaan kaum Yahudi AS, meningkatkan legitimasinya atau untuk melenggang sebagai Presiden AS di periode ke 2 mengimbangi citranya yang dianggap kontroversial baik di dalam maupun di luar negeri. Tulisan ini akan melihat bagaimana Trump memposisikan diri untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya diantara situasi yang akan menekan posisi kekuasaannya.

E. Hipotesis

Berdasarkan penulisan latar belakang permasalahan dan kerangka pemikiran yang akan digunakan dimana kebijakan Trump diambil karena dipengaruhi faktor *Leadership Style* gaya *crusader* yang cenderung menentang atau melebihi batasan politik AS selama ini dalam

mendukung Israel, maka dapat dirumuskan kesimpulan awal kepentingan Donald Trump dalam mendorong negara-negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel yaitu,

1. Donald Trump menjadikan Yahudi sebagai pertahanan terakhirnya untuk memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat pada November 2020. Hal tersebut didasarkan adanya faktor kurangnya dukungan masyarakat Amerika Serikat karena kekecewaan terhadap kepemimpinan Trump sebelumnya, kurangnya dukungan beberapa elite partai Republik untuk maju ke Pemilihan Presiden AS tahun 2020 dan disinyalir adanya intervensi Rusia yang membuat Hillary Clinton kalah dalam pemilihan Presiden AS pada 2016, sehingga Trump perlu memanfaatkan kaum Yahudi yang memiliki tingkat pemilih yang tinggi untuk memperoleh suara dalam pemilihan Presiden AS tersebut.
2. Sebagai strategi Amerika Serikat untuk memberikan tekanan maksimum terhadap Iran. Adanya normalisasi dengan negara-negara Arab membentuk sekutu baru bagi AS. Dari yang kita ketahui, negara-negara Arab yang melakukan normalisasi dengan Israel memiliki hubungan yang juga kurang harmonis dengan Iran sehingga hal tersebut dapat menyempitkan ruang gerak Iran terutama diwilayah yang berbatasan langsung seperti Uni Emirat Arab.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan tulisan dengan metode kualitatif deskriptif, dimana pada metode ini bersifat menekankan pada pemahaman

mengenai masalah kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang subyektif dan berdimensi banyak (Jatmika, 2016). Data dikumpulkan dengan mengandalkan teknik *library research* atau penelitan kepustakaan. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang valid yang diperoleh dari beberapa buku, *e-jurnal*, media online, majalah, dan dokumen-dokumen. Pengumpulan data tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi tulisan ini didalam analisa data.

2. Metode Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dimana memahami fakta yang digunakan dari data yang diperoleh kemudian dijadikan landasan dalam pengambilan kesimpulan oleh penulis (Sudaryono, 2017). Diawali dengan mengumpulkan fakta - fakta dari objek yang berkaitan kemudian fakta – fakta tersebut diubah menjadi general empiris, dan kemudian melalui general empiris dapat dilakukan perumusan konsep, merangkai preposisi dan diubah untuk menjadi induksi teori (Mas'oeed, 1990).

Objek yang diteliti merupakan seorang tokoh presiden yang cukup fenomenal yaitu Donald Trump. Penulis mengumpulkan fakta-fakta tersebut melalui sumber-sumber tulisan yang berasal dari buku, jurnal ter-indeks SINTA dan *Scopus*, dan juga melalui berita-berita akurat yang diakses melalui website terpercaya. Tentunya untuk mendapatkan kerangka teori dan hipotesa yang baik, telah banyak sumber yang ditelaah oleh penulis terutama terkait dengan sumber-sumber kebijakan Trump terhadap negara-negara yang dijadikan subjek dalam tulisan ini. Sehingga nanti pada akhir tulisan atau kesimpulan yang didapatkan dapat diuji dan dibuktikan dengan baik.

G. Sistematika Penulisan

BAB I berisikan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Hipotesa, Metodologi Penelitan dan Sistematika Penulisan.

BAB II, adanya uraian hubungan klasik antara Amerika Serikat dengan Israel. Menjelaskan terbentuknya AS dan Israel hingga sejarah hubungan kerja sama dan politik kedua negara.

BAB III, membahas tentang Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump pada tahun 2017 hingga 2021.

BAB IV, menjelaskan politik luar negeri AS terhadap dunia Islam dan negara-negara Arab dimasa kepemimpinan Donald Trump. Dinamika hubungan AS di bawah Trump dengan negara-negara Arab yang melakukan normalisasi yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Kemudian kepentingan Trump mendorong terjadinya normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel.

BAB V penulis memberikan kesimpulan dari hasil analisis bab-bab sebelumnya mengenai keseluruhan penelitian.